

## WACANA

# Transformasi Kemalis untuk Nasionalisme

Bagian Pertama  
dari Dua Tulisan

Oleh: Brigida Intan Printina

NASIONALISME bangsa mampu digenggam dengan suatu pembaharuan. Hal inilah yang digerakkan Mustafa Kemal Ataturk (Mustafa Kemal Pasha) dalam mengembangkan salah satu negara strategis yaitu Turki. Kemal ialah seorang staf pengajar di salah satu sekolah menengah militer di Turki pada tahun 1905. Ia mendirikan organisasi Masyarakat Tanah Air dan bergabung bersama Kongres Turki Muda untuk membentuk komite kebangsaan dan kemajuan (CUP). Salah satu cita-cita besar Kemal ialah mengubah Turki dari kekhalifahan menjadi sebuah negara. Meskipun ia dikenal sebagai diktator, ia tetap berani mengusung perubahan kekhalifahan menjadi nasionalisme secara keseluruhan.

Setelah Perang Dunia I pada tahun 1919 Kemal berusaha mewujudkan prinsip-prinsip generasi Turki Muda sehingga banyak elit nasional Turki berhasil memobilisasi perjuangan rakyat Turki dan melawan segala bentuk penjajahan. Transformasi yang diperjuangkan pun berhasil melalui suatu gerakan politis dan diplomatis dengan mendirikan suatu republik untuk memberlakukan suatu konstitusi baru bagi rakyat Turki pada tahun 1920. Kemal bersama masyarakatnya juga berhasil mengalahkan kekuatan Perancis dan mengusir mundur kekuatan Armenia yang mengancam Turki. Kemal menjadi presiden setelah memprookasi bangsa Eropa untuk mengakui kemerdekaan bangsa Turki yang ditandai oleh Perjanjian Lausane pada tahun 1923.

Beberapa hal yang menarik dari isi Perjanjian Lausane tahun 1923 ialah semua hak-hak ekstra-teritorial dari bangsa asing dihapus. Lebih dari itu perjuangan nasionalisme telah ditunjukkan Mustafa Kemal Pasha dalam negaranya bahkan dalam sistem pemerintahan dan peradilan pun dipikirkan secara matang agar negara tidak jatuh untuk kesekian kalinya ke tangan penjajah.

Dalam Perjanjian Lausane ditegaskan bahwa Turki berjanji untuk menerima para pengamat netral dalam sistem peradilannya dengan penguasa-penguasa yang murni dan tidak berkasus. Turki bebas dari pengawasan asing dalam bidang ekonomi dan keuangan serta dari tuntutan Sekutu atas ganti rugi. Bahkan Turki menerima perjanjian-perjanji-

an pokok guna melindungi golongan minoritas seperti direncanakan oleh beberapa negara Eropa dalam Konferensi Perdamaian Paris.

Sungguh merupakan suatu kebijakan yang amat strategis bagi suatu negara yang ingin berkembang. Kita hanya mendengar dalam serpihan masa lalu bahwa ultimatum hanya berlaku bagi penjajah yang telah kalah dan segera meninggalkan tanah Republik Indonesia, namun saat ini jarang mendengar ketegasan pemerintah memberikan kebijakan bagi para investor asing yang mengambil kekayaan alam baik di Papua maupun Kalimantan, meski beberapa kebijakan telah berjalan namun terfokus pada bidang kelautan. Ini adalah pekerjaan besar bagi kita untuk selalu mau belajar dari negara maju. “

Brigida Intan Printina MPd,  
Dosen FKIP Sejarah USD